



GAYA KEPEMIMPINAN INKLUSIF KEPALA DESA PLAWIKAN DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Penelitian di Desa Plawikan Kecamatan Jongolan Kabupaten Klaten)

Rema Marina
STPMD "APMD" Yogyakarta DIY

ARTICLE INFO

Keywords:
Inclusive Leadership,
Food Security

Abstract: *This scientific article answers the problem: How is the inclusive leadership style of Village Head Plawikan in strengthening food security during the Covid-19 pandemic? What obstacles does Plawikan Village Head face in realizing his inclusive leadership style? With descriptive-qualitative research methods and interactive analysis techniques this article results in the conclusion that Village Chief Plawikan's leadership style in strengthening food security is an inclusive leadership style. However, in order to optimize his leadership style, the Village Chief faces several obstacles: First, in terms of government-making, limitations on authority, HR, knowledge and coordination. Second, it is constrained by the attitude of some villagers who yearn for the leadership style of the old Village Chief as ruler and foreman. Third, the difficulty of changing existing cropping and food processing habits. Fourth, the weak social values inclusive culture and strengthens individualistic culture, so the food security movement for all citizens in need is difficult to convert.*

Kata Kunci:
Kepemimpinan
Inklusif,
Ketahanan Pangan

Abstrak: Artikel ilmiah ini menjawab permasalahan: Bagaimana gaya kepemimpinan inklusif Kepala Desa Plawikan dalam memperkuat ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19? Kendala-kendala apa yang dihadapi Kepala Desa Plawikan dalam mewujudkan gaya kepemimpinan inklusifnya? Dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif dan teknik analisis interaktif artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa Plawikan dalam memperkuat ketahanan pangan, adalah gaya kepemimpinan inklusif. Namun, untuk mengoptimalkan gaya kepemimpinannya, Kepala Desa menghadapi beberapa kendala: *Pertama*, dari sisi *government-making*, keterbatasan kewenangan, SDM, pengetahuan dan koordinasi. *Kedua*, terkendala oleh sikap sebagian warga desa yang merindukan gaya kepemimpinan Kepala Desa lama sebagai penguasa dan mandor. *Ketiga*, kesulitan mengubah kebiasaan tanam dan pengolahan pangan yang ada. *Keempat*, lemahnya nilai-nilai sosial inklusif budaya dan menguatnya budaya individualistic, sehingga gerakan ketahanan pangan untuk seluruh warga yang membutuhkan, sulit direalisasikan.

**Corresponding
Author:**
dosen.remarina@g
mail.com

Accepted Journal:
2Maret 2022
Reviewed Journal:1
April 2022
Published Journal:25
April 2022

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama hampir dua tahun telah mendera banyak rakyat Indonesia, termasuk rakyat Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Semenjak Kabupaten Klaten ditetapkan oleh Bupati Klaten sebagai kabupaten berstatus Tanggap Darurat Bencana Non Alam atas Covid-19 Tanggal 30 Maret Tahun 2020, (SK Bupati Klaten Nomor 360/114 Tahun 2020), korban terus berjatuhan.

Per 1 Juli 2021, tercatat warga kontak erat berjumlah 37 orang dan terkonfirmasi positif berjumlah 38 orang, berasal dari 8 RW. Sementara itu, warga desa yang terdampak semakin luas. Hal ini terlihat dari data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berikut: Pada Tahun 2021, warga penerima BLT berjumlah 98 orang, berasal dari 11 RW (Pemerintah Desa Plawikan, Semester 1, Tahun 2021). Penduduk yang menerima bantuan PKH Tahun 2021 berjumlah. 272 orang. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berjumlah 1.751 orang

Sementara itu, penduduk yang bermata-pencarian di Desa Plawikan hanya 20,80% atau 727 orang dari penduduk desa yang berjumlah 3.469 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1.723 dan perempuan: 1.773, serta 1.120 Kepala Keluarga (Monografi Desa Plawikan Tahun 2020, Semester 1 Tahun 2021). Jumlah 20,80% tersebut sudah termasuk tenaga tidak tetap, seperti pedagang kecil, tukang, buruh tani, jasa, angkutan, dan tukang serabutan. Dari data terlihat betapa berat persoalan pangan di Desa Plawikan ini, karena 79,20% warga desa terdampak Pandemi Covid-19 masih menganggur dan membutuhkan bantuan pangan.

Pada saat Pandemi Covid-19 masih mengganas, penanganan pangan dilakukan oleh Kepala Desa melalui Satgas *Jogo Tonggo*, yang ada di tiap RW, secara khusus melalui Satgas Bidang Ekonomi (SK Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020). Kepala Desa melayani dan melindungi warga desa dengan menggerakkan warga desa yang sehat untuk berbelarasa membantu tetangga terdekatnya dengan menyediakan makanan siap saji. Di awal Pandemi, gerakan menjaga tetangga (*Jogo Tonggo*) dengan melayani pangan siap saji tetangganya berjalan lancar dan efektif, serta dapat melindungi warga desa yang terdampak. Namun setelah gerakan itu berjalan satu tahun, kebosanan, kelelahan, dan ketidak-berdayaan warga desa melayani pangan tetangga, mulai terlihat.

Ketika Pandemi Covid-19 menurun dan jumlah warga yang terpapar berkurang, tidak berarti beban Kepala Desa pada warga yang kekurangan pangan berkurang. Sebaliknya kini focus perhatian Kepala Desa bergeser dari warga yang terpapar ke warga yang kekurangan pangan. Terlebih ketika Bupati Klaten, melalui surat edaran tertanggal 6 Januari 2022, sesuai perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, mengafirmasi kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) yang harus mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Disebutkan bahwa BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; *Kedua*, Kehilangan mata pencaharian; *Ketiga*, Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; *Keempat*, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN; *Kelima*, keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau *Keenam*, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Dengan afirmasi tersebut, di satu sisi warga desa yang berkekurangan pangan akan mendapat kepastian memperoleh bantuan langsung tunai sebesar Rp. 300.000 per bulan; namun di sisi lain tanggungjawab Kepala Desa pada warga yang berkekurangan, termasuk kekurangan pangan semakin berat.

Menghadapi tanggungjawab yang semakin besar ini, Kepala Desa, melakukan gerakan memperkuat ketahanan pangan dari tingkat RT, yang semula pada tingkat RW oleh Satgas *Jogo Tonggo* (SK Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020).. Gerakan ini semakin kelihatan dayanya ketika tanggal 29 November 2021, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021. Dalam Perpres tersebut (Pasal 5, ayat 4): dijelaskan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk: *Pertama*, program perlindungan sosial berupa bantuan; langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); *Kedua*, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); *Ketiga*, dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan *Keempat*, program sektor prioritas lainnya. Dengan Perpres ini, program ketahanan pangan nabati dan hewani terafirmasi, yaitu 20% dari Dana Desa. Sekaligus tanggungjawab Kepala Desa untuk memperkuat ketahanan pangan nabati dan hewani semakin besar.

Guna membantu para Kepala Desa dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 104 Tahun 2021, Bupati Klaten, melalui Surat Edaran kepada seluruh Camat tertanggal 6 Januari 2022, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani, sesuai Perpres Nomor 104 Tahun 2021, Pasal 34, sebagai berikut: *pertama*, Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani dalam APBDes; *kedua*, Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa; *ketiga* penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai dengan Permendesa PD TT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 meliputi: *Pertama*, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; *Kedua*, pembangunan lumbung pangan Desa; *Ketiga*, pengolahan pasca panen; dan *Keempat*, penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Dengan afirmasi ini menjadi jelas bahwa Kepala Desa Plawikan berkewajiban melakukan upaya penguatan ketahanan pangan bagi warganya, dengan memastikan anggarannya di APBDes; memastikan adanya kegiatan penguatan ketahanan pangan yang sesuai dan memastikan kegiatan-kegiatan penguatan ketahanan pangan secara rinci.

Keseriusan pemerintah Pusat dan Daerah dalam memperkuat ketahanan pangan tersebut menantang gaya kepemimpinan Kepala Desa Plawikan karena gaya kepemimpinannya akan menentukan keberhasilannya dalam memperkuat ketahanan pangan. Dalam observasi awal, penulis mendengar, *pertama*, bahwa bagi sebagian warga desa, gaya kepemimpinan kepala desa Plawikan dirasakan sebagai penguasa dan anti kritik. Selain itu, *kedua*, gaya kepemimpinan kepala desa bagi sebagian orang lagi dirasakan sebagai mandor, sekedar bekerja apa adanya (*taken for granted*), sesuai perintah pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta Pusat, dan kurang melakukan inovasi bagi perubahan untuk membangun tata kehidupan bersama yang demokratis dan menyejahterakan masyarakat.

Selain itu dalam observasi awal, penulis juga menemukan beberapa permasalahan dalam program ketahanan pangan, yaitu: *pertama*, Gerakan pemanfaatan lahan kosong untuk kepentingan bersama masih lemah, belum jelas apa yang akan ditanam, bagaimana mengelola lahan tersebut dan penyaluran hasil tanaman, serta masih ada beberapa lahan kosong yang dimanfaatkan secara pribadi. *Kedua*, masalah kekurangan dana untuk merealisasikan rencana-rencana pengolahan lahan untuk kepentingan bersama; *Ketiga*, belum semua masyarakat aktif dalam melaksanakan program ketahanan pangan.

Dari permasalahan tentang gaya kepemimpinan dan pengelolaan program ketahanan pangan, serta kucuran Dana Desa berdasarkan perpres tersebut tentu diperlukan sebuah gaya kepemimpinan dari Kepala Desa Plawikan yang lebih inovatif dan progresif, agar program ketahanan pangan ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Desa Plawikan. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk melakukan penulisan artikel berbasis penelitian dengan judul: Gaya kepemimpinan inklusif Kepala Desa Plawikan dalam memperkuat ketahanan pangan di masa Pandemi Covid-19.

Penulis menyadari bahwa artikel berbasis penelitian ini bukan satu-satunya artikel tentang gaya kepemimpinan Kepala Desa. Setidaknya ada tiga penulis artikel berbasis penelitian yang telah melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan Kepala Desa, yaitu:

Pertama, Wayan Ardi Andika, Bambang Utoyo S, Eko Budi Sulistio, Tahun 2021, yang berjudul: Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani

Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (<http://repository.lppm.unila.ac.id/31413/1/220523%20Gaya%20Kepemimpinan%20Kepala%20Desa%20Dalam%20Meningkatkan%20Partisipasi%20Masyarakat%20untuk%20Pembangunan%20Desa.pdf>, diunduh tanggal 10 Januari 2022)

Kedua, Nofi Wendari. 2021. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Di Kantor Desa Moahino Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu (dalam *Cenderawasih, Journal of Administration and Management Public Literation*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021 e-ISSN: 2807-5927, <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/158-Article%20Text-462-2-10-20210830.pdf>, diakses tanggal 5 Januari 2022)

Ketiga, Budi Harsono dan Hario Damar, Tahun 2020, berjudul: Inklusifitas Desa dalam Mendukung Penerimaan Negara melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Studi di Desa Panggunharjo (dalam: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/578>, diunduh tanggal 11 Januari 2022).

Persamaan artikel ini dibandingkan dengan ketiga artikel tersebut adalah bahwa semua artikel berbicara tentang gaya kepemimpinan Kepala Desa dan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa artikel ini berbicara tentang gaya kepemimpinan inklusif Kepala Desa dan gaya kepemimpinan tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan.

Dari seluruh uraian di atas menjadi jelas bahwa rumusan masalah yang akan dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan inklusif Kepala Desa Plawikan dalam memperkuat ketahanan pangan di masa Pandemi Covid-19 dan kendala-kendalanya. Fokus perhatian penulis adalah *pertama*, basis ontologis kepemimpinan inklusif; *kedua*, gaya kepemimpinan inklusif; *ketiga* pembentukan kepemimpinan inklusif; dan *keempat*, sifat pemimpin inklusif.

METODE PELAKSANAAN

Artikel berbasis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif (I Made Laut Mertha Jaya 2020:110-111). Obyek penelitian yang dipilih adalah gaya kepemimpinan inklusif Kepala Desa Plawikan dalam memperkuat ketahanan pangan di masa Pandemi Covid-19. Lokasi penelitian di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive*, dengan 12 informan. Teknik pengumpulan data (Zulkarnain Lubis 2020:61) meliputi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif (dalam Moleong 2017: 250) yang meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gaya Kepemimpinan Inklusif Kepala Desa Plawikan dalam Memperkuat Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19

a. Basis Ontologis Kepemimpinan Inklusif dan *government-making*

Mengenai basis ontologis kepemimpinan inklusif Kepala desa Plawikan dan *government-making*, penulis memperoleh informasi dari Bapak Camat Jogonalan. Ia mengatakan bahwa Kepala Desa Plawikan memiliki pemahaman yang baik mengenai pemerintah yang demokratis dan bahwa pemenuhan pangan perlu dilakukan secara demokratis, melalui kepemimpinan yang terbuka dari, oleh dan bagi seluruh warga desa. Kepemimpinan tersebut diwujudkan dalam pelayanan dan perlindungan pangan dari, oleh dan bagi seluruh warga. Kepala Desa menyadari bahwa Desa memiliki potensi untuk mengadakan dan memperkuat ketahanan pangan. Meski demikian ia juga menyadari bahwa potensi untuk memperkuat ketahanan pangan di desanya terbatas. Oleh karena itu perlu menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang peduli pada penguatan ketahanan pangan, seperti: petani, pedagang, pemilik toko pertanian, dan dinas-dinas yang terkait dengan pangan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dibahas lebih lanjut sebagai berikut: Basis ontologis kepemimpinan inklusif Kepala Desa mesti diletakkan pada basis ontologis pemerintah yang benar, yaitu pada sila ke 4 (empat) dan 5 (lima) Pancasila. Dalam Sila keempat disebutkan bahwa *pertama*, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah dasar adanya pemerintah. Pemerintah itu ada karena adanya rakyat. Lebih konkrit, Pemerintah (desa) berasal dari rakyat, oleh pemerintah (desa) dan parlemen (perwakilan rakyat desa) dan untuk seluruh rakyat (desa). *Kedua*, pemerintah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan. Ini berarti bahwa suara seluruh rakyat adalah suara kebijaksanaan (*vox populi, vox Dei*). Kemudian dalam sila kelima disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kepemimpinan seorang Kepala Desa, berdasar sila keempat dan kelima tersebut, haruslah kepemimpinan inklusif, kepemimpinan untuk seluruh rakyat. Artinya sebuah kepemimpinan yang sadar betul bahwa yang paling penting dari kepemimpinan inklusif ini adalah semua elemen warga dilibatkan. *No one left behind*, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, semuanya dilibatkan khususnya penyandang disabilitas, kelompok rentan, kelompok perempuan dan anak

Dari hasil wawancara dan pembahasan tersebut, penulis menyatakan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa Plawikan telah bersifat inklusif dalam memperkuat ketahanan pangan dan berperan besar dalam pembentukan pemerintah (*government making*) desa, utamanya melalui pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat desa Plawikan yang membutuhkan pangan, secara khusus kelompok rentan dan marginal.

b. Gaya Kepemimpinan Inklusif

Mengenai gaya kepemimpinan inklusif Kepala Desa ini, Ketua RW 10 memberikan kesaksian bahwa Kepala Desa Plawikan, *pertama*, memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga desa, termasuk kaum rentan dan marginal untuk menyediakan pangan; *kedua*, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan lumbung-lumbung pangan di desa. Kemudian Sekretaris desa menyampaikan informasi bahwa Kepala Desa sejak menjabat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam memperkuat ketahanan pangan, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi warga untuk bercocok tanam dan memelihara hewan, seperti ayam, ikan, bebek untuk kebutuhan pangan. Kepala Desa juga memperkuat pilar demokrasi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan desa, yaitu: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepemimpinan; *ketiga*, mendorong reproduksi kader dan pemimpin

desa secara berkelanjutan yang peduli pada pelayanan dan perlindungan warga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurut seorang perangkat desa, Kepala Desa di beberapa pertemuan di tingkat RW selalu memberikan motivasi dan dorongan agar warga mencintai dan meminati desanya dengan bersedia mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah pangan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dibahas lebih lanjut sebagai berikut: Sesungguhnya terdapat tiga gaya kepemimpinan Kepala Desa, yakni *pertama*, kepemimpinan regresif, yang melahirkan gaya kepemimpinan penguasa dan *kedua*, kepemimpinan konservatif-involutif, yang melahirkan gaya kepemimpinan mandor serta *ketiga* kepemimpinan inovatif-progresif. Gaya kepemimpinan pertama dan kedua telah disebut di latar belakang sedangkan kepemimpinan ketiga, yaitu kepemimpinan inovatif- progresif, merupakan kepemimpinan yang pro perubahan. Tipe kepemimpinan semacam ini cenderung lahir dari *habitus* Desa civil (sipil) tempat bersemainya nilai-nilai demokratis. Gaya kepemimpinan ketiga ini yang kemudian disebut dengan gaya kepemimpinan inklusif (Sutoro Eko, 2021:10-11). Dari kerangka konseptual dan hasil wawancara dengan informan, penulis menyatakan bahwa Kepala Desa Plawikan telah memiliki gaya kepemimpinan inklusif untuk memperkuat ketahanan pangan di desa karena *pertama*, telah membuka ruang partisipasi bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan dan marginal, dan membentuk pemerintahan yang peduli pada penguatan ketahanan pangan melalui pelayanan dan perlindungan pangan terhadap warga desa.

c. Pembentukan Kepemimpinan Inklusif

Pembentukan kepemimpinan inklusif, menurut Ketua RT 04/RW 10, dapat terjadi melalui proses demokrasi. Ia mengatakan bahwa Kepala desa Plawikan memfungsikan musyawarah Desa sebagai forum demokrasi yang cukup luas bagi kelompok marginal dan rentan untuk memperkuat ketahanan pangan. Musyawarah Desa digunakan untuk memetakan siapa yang memiliki lahan kosong yang dapat dimanfaatkan, siapa yang dapat menyediakan benih, pupuk, hewan ternak, ikan. Tak kalah pentingnya, dalam musyawarah tersebut juga dibahas penggunaan anggaran yang ada untuk kebutuhan pengadaan dan penguatan pangan. Hal itu terlihat dalam musyawarah tentang pembuatan: lahan untuk budidaya jamus di RW 04, normalisasi irigasi, rehab kolam ikan, dan pembuatan taludsaluran irigasi. Selain itu, Kepala Desa memfungsikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintah Desa yang dituju oleh kelompok marginal dan rentan dalam menyampaikan aspirasi. Umumnya warga desa, khususnya kaum marginal merasa lebih nyaman dan berani menyampaikan aspirasinya kepada anggota BPD daripada kepada Kepala Desa.

Sementara itu, Sekretaris Desa memberikan informasi bahwa Kepala Desa mendorong warga Desa untuk mampu memilih kepala Desa dan anggota BPD yang peduli pada ketahanan pangan dan yang berpihak kepada kelompok marginal dan rentan. Kepala Desa menyelenggarakan kaderisasi Desa yang kelak memiliki minat untuk mengisi jabatan dan peluang kerja yang ada di desa, serta memiliki kepedulian, pengetahuan dan keterampilan dalam pengadaan dan pengolahan pangan.

Menurut salah seorang perangkat desa, pembentukan kepemimpinan inklusif juga dapat terjadi melalui jalan pembangunan. Menurut dia, Kepala Desa seringkali mendorong dan memastikan warga Desa agar memiliki arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang mengutamakan pangan, karena Desa adalah lumbung pangan bagi warganya; dan memastikan adanya arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan

kepada upaya pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya untuk kelompok marginal dan rentan, karena pada dasarnya mereka menjadi tanggungjawab desa. Menurut salah seorang perangkat desa, dorongan dan arah kebijakan pro pangan Kepala Desa terlihat dalam kegiatan-kegiatan: Budidaya jamur RW 04; Normalisasi irigasi; Ketahanan pangan tingkat RT, Rehab kolam ikan dan pembuatan talud saluran irigasi.

Seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa pembentukan kepemimpinan inklusif dapat terjadi melalui kegiatan adat dan budaya. Ia memberikan informasi bahwa adat dan budaya sangat dekat dan lekat dengan pertanian, perikanan dan peternakan. Banyak upacara adat dan budaya mewujudkan denyut jantung kegiatan dalam pengadaan pangan nabati dan hewani. Upacara adat dan budaya digunakan untuk merayakan kegiatan tanam dan panen. Kepala Desa menyelenggarakan kegiatan adat dan budaya Desa yang memuat nilai-nilai inklusi sosial untuk memperkuat ketahanan pangan, seperti nilai kebersamaan, gotong royong, kepedulian. Secara konkret kepala desa mendorong terlaksananya latihan menari, latihan gamelan, dan menyanyi yang memuat nilai-nilai sosial inklusif. Selain itu, Kepala Desa juga mendorong terlaksananya latihan dan pengajaran kepada warga Desa tentang nilai-nilai inklusi sosial untuk memperkuat ketahanan pangan yang terkandung dalam adat dan budaya Desa;

Ketua RT 05/RW 10 yang sekaligus sie kebudayaan memberikan informasi bahwa Kepala Desa mendorong terselenggaranya promosi adat dan budaya desa yang mengandung nilai-nilai inklusi sosial untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai sumber pemajuan kebudayaan Desa, kebudayaan daerah dengan cara menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa seperti: forum kebudayaan Desa, pekan kebudayaan Desa, atau festival seni tradisional. Uniknya kebudayaan desa tersebut dikaitkan dengan budaya tanam, budaya panen di desa sehingga upaya memperkuat ketahanan pangan memperoleh daya dari adat dan kebudayaan. Hal itu terlihat ketika akan memulai budidaya jamur dan membudidayakan ikan lele di RW 04.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dibahas lebih lanjut sebagai berikut: Kepemimpinan inklusif Kepala Desa dapat dibentuk melalui tiga jalan yaitu jalan demokrasi, pembangunan partisipatif dan kebudayaan: Jalan demokrasi adalah ruang membangun kepemimpinan inklusif; Jalan pembangunan adalah sarana penempatan bagi kepemimpinan inklusif; dan Jalan budaya adalah kekuatan dalam membentuk kepemimpinan inklusif (Bdk. Sutoro Eko, dkk., 2021:24-25). Menurut para informan yang dapat dihimpun, Kepala Desa telah secara sadar menggunakan jalan demokrasi, pembangunan dan kebudayaan sebagai ruang, sarana penempatan diri dan daya bagi gaya kepemimpinan inklusif di Desa Plawikan. Ia menyadari bahwa ketiga jalan itu dapat ia temukan di Desa, maka ia berusaha mengembangkan potensi ketiga jalan tersebut untuk mengembangkan gaya kepemimpinan inklusif di Desa Plawikan. Sekaligus, ia menyadari keterbatasan potensi ketiga jalan itu di desanya, maka untuk menambahkannya, ia memperkuat gaya kepemimpinan inklusifnya dengan melihat praksis gaya kepemimpinan inklusif di desa-desa lain untuk memperkuat ketahanan pangan.

d. Sifat Pemimpin Inklusif

Sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Kepala Desa Plawikan dalam pandangan Ketua RT 03/Rw 10, adalah *rendah hati* karena Kepala Desa memiliki sikap terbuka terhadap warganya dan respek terhadap kesalahan. Hal itu terlihat ketika Kepala Desa mengunjungi para pengurus RT dan RW guna melihat kesiapan RT dan RW dalam menyediakan pangan bagi warganya yang membutuhkan. Ia memperlakukan pengurus RT dan RW sebagai saudara dalam satu Tim kerja. Ia mau mendengarkan keluh kesah pengurus dan tak memperuncing kesalahan pengurus RT/RW. Sifat kepemimpinan lain yang dirasakan oleh Ketua RT

02/RW 10 adalah keinginannya untuk tahu akan sesamanya. Menurutnya, Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang peduli secara personal dan empati terhadap pengurus RT/RW sebagai satu Tim dalam kerja penguatan ketahanan pangan desa. Pengurus RT/RW merasa diperhatikan secara personal dan dilindungi ketika menghadapi kritikan warga. Sementara itu, menurut seorang penerima layanan bidang ekonomi, Kepala Desa memiliki sifat komitmen secara nyata, artinya, Kepala Desa memiliki kemauan kuat untuk menerima dan menghormati perbedaan dan keberagaman dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Menurut kesaksian Ketua Bidang Ekonomi, Satgas *Jogo Tonggo*, Kepala Desa memiliki sifat mau bekerjasama secara efektif. Artinya, ia suka memberdayakan orang lain dengan memberikan motivasi, semangat dan fasilitas, misalnya: fasilitas untuk pengolahan lahan, bibit, pupuk, peralatan. Ia juga memiliki keragaman pemikiran dan focus pada ikatan tali persaudaraan dengan pengurus sebagai satu tim. Ia merasa dekat dan bekerja dengan Kepala Desa rasanya nyaman.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilakukan pembaharuan lebih lanjut sebagai berikut: Menurut Juliet Bourke and Andrea Espedido, ada 6 (enam) sifat pemimpin inklusif yaitu: *Visible commitment; humility; awareness of bias; curiosity about others; cultural intelligence; effective collaboration* (Budi Harsono dan Hario Damar, 2020:721). Dari hasil informasi yang dapat penulis kumpulkan, sesungguhnya Kepala Desa Plawikan memiliki sifat 4 (empat sifat) itu, yaitu *Visible commitment; humility; curiosity about others; dan effective collaboration*.

Sementara itu, menurut Ryan, kepemimpinan inklusif bukan istilah yang menunjuk kedudukan seseorang yang melaksanakan tugas yang sudah ditentukan tetapi sebagai proses kolektif yang ada pada setiap orang atau yang mewakili (Budi Harsono dan Hario Damar, 2020:721). Jika sifat-sifat kepemimpinan inklusif yang telah disampaikan oleh para informan tadi, dilihat dari teori yang disampaikan oleh Ryan maka penulis dapat mengatakan bahwa sifat-sifat kepemimpinan inklusif Kepala Desa dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kolektif dalam memperkuat ketahanan pangan.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Kepala Desa Plawikan dalam Mewujudkan Gaya Kepemimpinan Inklusif

Untuk mengoptimalkan gaya kepemimpinan inklusif, Kepala Desa Plawikan menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

Pertama, dari sisi *Government-making*, seringkali gaya kepemimpinan inklusif Kepala Desa untuk melayani dan melindungi pangan warga terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan kekuatan dalam pelayanan dan perlindungan. Akibatnya, Kepala Desa tidak dapat melakukan inovasi dan gerakan progresif dalam pelayanan dan perlindungan pangan kepada seluruh warga pada waktu yang bersamaan. Atas kenyataan itu, sebagian warga sering mengkritiknya sebagai pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang eksklusif (hanya melayani dan melindungi warga desa tertentu saja khususnya RW 04)

Kedua, dari sisi gaya kepemimpinan, kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Plawikan dalam gaya kepemimpinan inklusif adalah masih kuatnya pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa lama yang bergaya penguasa dan mandor. Tak dapat dielakkan bahwa setiap gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa akan dikagumi oleh sebagian warga yang kala itu menjadi pengikut setianya. Akibatnya, Kepala Desa Plawikan sekarang yang demokratis malah seringkali dikritik sebagai Kepala Desa dengan gaya kepemimpinan yang lemah, terlalu mengikuti suara warga, dan tak mampu mengawasi berdasarkan aturan (tak

mampu mengawasi ala mandor). Hal itu terjadi, misalnya, dalam normalisasi irigasi, pembuatan talud saluran irigasi, dan rehab kolam ikan, yang melibatkan banyak warga desa

Ketiga, dari sisi pembentukan kepemimpinan inklusif, kendala yang dihadapi Kepala Desa Plawikan dalam mewujudkan gaya kepemimpinan inklusif adalah keterbatasan sebagian besar warga desa dalam berdemokrasi. Partisipasi warga desa dalam memperkuat ketahanan pangan masih lemah dan belum merata. Akibatnya rencana memperkuat ketahanan pangan tingkat RT tidak dapat direalisasikan 100% di tiap RT. Kendala lain, menurut seorang tokoh masyarakat, adalah memastikan adanya kewenangan Desa yang memuat urusan-urusan yang dibutuhkan oleh kelompok marginal dan rentan dalam memenuhi hak dan kepentingannya. Kendala ini terjadi lantaran Kepala Desa kekurangan tenaga relawan untuk merealisasikan kewenangan tersebut, sementara tenaga dari pemerintah desa sudah *over-load*. Hal ini juga karena lemahnya pengetahuan dan praktik berdemokrasi di Desa. Urusan Desa, menurut banyak warga, masih dianggap sebagai urusan Kepala Desa dan perangkatnya saja. Dalam situasi seperti itu, kepemimpinan inklusif Kepala Desa bisa menjadi sebuah kepemimpinan individual. Jika sudah demikian, tak heran jika upaya memperkuat ketahanan pangan melalui pembuatan lumbung pangan bersama gagal.

Selain itu, kendala juga dialami dalam pembangunan. Menurut Ketua RT 03/RW 10, Kepala Desa mengalami kendala dalam memastikan sumber daya pembangunan yang ada di Desa yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik/infrastruktur, dan sumber daya finansial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga Desa khususnya kesejahteraan kelompok marginal dan rentan. Kendala konkritnya adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa serta *state-holders* lainnya, sehingga masing-masing mengendalikan sumber-sumber itu untuk tujuan mereka sendiri-sendiri. Menurut Ketua RT 02/RW 10, Kepala Desa mengalami kendala dalam memastikan setiap warga Desa, khususnya kelompok marginal dan rentan, untuk mampu hidup dan berpehidupan secara berkelanjutan dengan mendayagunakan secara mandiri beragam sumber daya pembangunan yang ada di keluarganya, kelompoknya, komunitasnya, maupun Desanya. Kendala konkrit yang dihadapi oleh Kepala Desa adalah keterbatasan dana pendukung, keterbatasan tenaga relawan dan lemahnya koordinasi antara keluarga, kelompok, komunitas sosial yang ada di desa, maupun Desanya.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat, kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam pembentukan kepemimpinan inklusif melalui jalan pembangunan ini terletak dalam memastikan warga Desa khususnya kelompok marginal dan rentan untuk mampu berpartisipasi aktif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa. Selama ini partisipasi dalam ketiga tahapan itu hanya terbatas pada beberapa warga saja. Harus diakui bahwa keterbatasan hidup sebagian besar warga menyebabkan sebagian besar tenaga dan waktunya tercurah untuk mencari sesuap nasi bagi kelangsungan hidup mereka, sehingga sebagian besar warga agak sulit untuk masih diminta berpartisipasi dalam memperkuat ketahanan pangan.

Akibatnya, pembangunan yang semestinya dapat menjadi medan penempatan diri secara inklusif, menjadi terkesan eksklusif. Akibat tersebut juga berdampak pada upaya memperkuat ketahanan pangan. Upaya ini akhirnya hanya didukung oleh kelompok tertentu saja, dan belum didukung oleh seluruh warga desa pada tingkat RT.

Kendala dalam pembentukan kepemimpinan inklusif dalam memperkuat ketahanan pangan juga datang dari adat dan budaya. Hal ini terasa ketika Kepala Desa dengan kepemimpinan inklusifnya ingin melakukan perubahan pola tanam dan pola panen. Kebiasaan menanam padi, misalnya, yang telah membudaya di kalangan warga, sangat sulit diubah menjadi kebiasaan menanam sayuran atau palawija, yang dibutuhkan oleh warga

desa dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kepala desa sering dikritik sebagai Kepala Desayang kurang memahami adat dan budaya menanam padi. Budaya yang semestinya menjadi daya dalam pembentukan kepemimpinan, malah berubah menjadi kendala dalam pembentukan kepemimpinan inklusif.

Keempat, dari sisi sifat pemimpin inklusi, kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Plawikan adalah tidak adanya kajian-kajian ilmiah tentang adat dan budaya yang ada di Desa Plawikan, sehingga nilai-nilai inklusi sosial dalam adat dan budaya tidak dipahami oleh warga desa, terlebih kaum mudanya. Kegiatan-kegiatan adat dan budaya terjebak dalam upacara budaya rutin yang membosankan, terkesan itu-itu saja, kurang dipahami nilai-nilai sosial inklusinya, dan kurang dipahami kaitannya dengan budaya tanam dan budaya memelihara hewan untuk pangan warga desa. Menurut kesaksian Ketua RT 05/RW 10, Kepala Desa mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/pelatihan inklusi sosial bagi warga Desa khususnya kelompok marginal dan rentan karena menurunnya harapan dan semangat hidup sekelompok warga di masa Pandemi ini, utamanya keluar ga yang terpapar dan terdampak. Mereka terkungkung dalam kesedihan, kebingungan, bahkan keputusan yang berkepanjangan. Tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan pengalaman pahit dan maju dengan penuh semangat membarui hidup keluarganya, sehingga kepedulian mereka pada sesama juga menurun. Akibatnya, budaya yang berkembang malah budaya individualistic, sehingga warga desa cenderung malas, konsumtif (lebih menuruti keinginan dari pada kebutuhan), mengedepankan gengsi. Dalam memperkuat ketahanan pangan, budaya individualistic ini terlihat dari sulitnya memanfaatkan lahan kosong untuk kepentingan pangan bersama, minimnya relawan, serta lemahnya koordinasi. Menghadapi situasi seperti itu, Kepala desa sulit mengembangkan dan memperkuat sifat pemimpin inklusifnya, meski tidak sampai jatuh ke pemilikan sifat eksklusif. Sifat inklusif dalam kepemimpinan Kepala Desa seolah berada di rimba sifat individualistic warga desanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Dari seluruh uraian, penulis dapat menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa Plawikan dalam memperkuat ketahanan pangan, adalah gaya kepemimpinan inklusif. Hal ini karena *pertama*, telah dibangun diatas pemahaman tentang pemerintah dan *government-making* yang benar, untuk melayani dan melindungi kebutuhan pangan seluruh warga desa. *Kedua*, gaya kepemimpinan Kepala Desa telah inovatif dan progresif. *Ketiga*, Kepala Desa telah mampu memanfaatkan realitas demokrasi, pembangunan dan adat budaya untuk memperkuat ketahanan pangan. *Keempat*, Kepala Desa telah memiliki 4 sifat dasar kepemimpinan inklusif, yaitu sifat rendah hati, peduli terhadap sesama, kerjasama, dan komit terhadap tanggungjawabnya.

Meski demikian, untuk mengoptimalkan gaya kepemimpinannya, Kepala Desa menghadapi beberapa kendala: *Pertama*, dari sisi *government-making*, keterbatasan kewenangan, SDM, pengetahuan dan koordinasi telah menyebabkan pelayanan dan perlindungan kepada warga dalam memenuhi kebutuhan pangan juga terbatas. *Kedua*, dari sisi gaya kepemimpinan inklusif, Kepala Desa seringkali mendapat kritik dari warga desa yang merindukan gaya kepemimpinan Kepala Desa lama sebagai penguasa dan mandor dalam mengupayakan ketahanan pangan. *Ketiga*, dari sisi pembentukan kepemimpinan, Kepala Desa terkendala oleh minimnya pengetahuan dan partisipasi warga dalam berdemokrasi, keterbatasan relawan, kewenangan, sumber alam dan finansial dalam pembangunan, serta sulitnya mengubah kebiasaan tanam dan pengolahan pangan yang ada. *Keempat*, dari sisi sifat pemimpin inklusif, Kepala Desa terkendala oleh lemahnya nilai-nilai sosial inklusif dari adat-

budaya dan menguatnya budaya individualistik sehingga upaya memperkuat ketahanan pangan untuk warga desa yang membutuhkan sulit direalisasikan.

Saran:

Untuk mengoptimalkan gaya kepemimpinan inklusif Kepala Desa Plawikan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

Pertama, agar Kepala Desa dan warga desa lebih menggiatkan pelayanan dan perlindungan pangan warga kepada mereka yang tak mampu, rentan dan marginal di tingkat RT.

Kedua, agar Kepala desa dan warga desa lebih mengobarkan inovasi, kreasi dan semangat pembaharuan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan

Ketiga, agar Kepala Desa dan warga desa meningkatkan partisipasi dalam musyawarah, pembangunan, kehidupan adat dan budaya desa sehingga pangan dirasakan dari, oleh dan untuk warga desa

Keempat, agar Kepala Desa dan warga desa saling mendorong untuk memahami nilai-nilai sosial inklusif sehingga mendorong spirit warga desa untuk berbagi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Harsono dan Hario Damar. 2020. Inklusifitas Desa dalam Mendukung Penerimaan Negara melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Studi di Desa Panggungharjo, dalam <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/578>, diunduh tanggal 11 Januari 2022.
- I Made Laut Mertha Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant, Yogyakarta.
- Kementerian Desa. 2019. Panduan Fasilitasi Desa Inklusif. Jakarta: Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nofi Wendari. 2021. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Di Kantor Desa Moahino Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu, dalam *Cenderawasih, Journal of Administration and Management Public Literation*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021 e-ISSN: 2807-5927, file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/158-Article%20Text-462-2-10-20210830.pdf, diakses tanggal 5 Januari 2022)
- Sutoro Eko, dkk. 2015. *Desa Membangun Indonesia*, FPPD-ACCSES, Yogyakarta.
- Sutoro Eko, dkk. 2021. Panduan Kepemimpinan untuk Desa Inklusif, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
- Wayan Ardi Andika, Bambang Utoyo S, Eko Budi Sulistio. 2021. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, dalam <http://repository.lppm.unila.ac.id/31413/1/220523%20Gaya%20Kepemimpinan%20Kepala%20Desa%20Dalam%20Meningkatkan%20Partisipasi%20Masyarakat%20untuk%20Pembangunan%20Desa.pdf>, diunduh tanggal 10 Januari 2022.
- Zulkarnain Lubis. 2019. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*. CV Andi Offset, Yogyakarta.

Perundang-undangan dan Sumber Lain

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/114 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam atas Covid-19 di Wilayah Kabupaten Klaten
Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 974.16/015/17, tentang Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2022
Surat Keputusan Kepala Desa Plawikan, Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas *Jogo Tonggo* Pencegahan Covid-19
Monografi Desa Plawikan, Semester 1, Tahun 2021.